

Pendampingan Masyarakat dalam Perencanaan Infrastruktur Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

Zefri Yedi¹, Eddy Wibowo²

¹Universitas Ratu Samban, bengkuluyedi027@gmail.com, ²Universitas Ratu Samban, eddywibowo@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

pendampingan masyarakat, perencanaan infrastruktur, pembangunan desa, Teknik Sipil, Air Baus 1.

Riwayat Artikel:

Diterima 18-09-2026

Direvisi 25-09-2026

Disetujui 10-10-2026

ABSTRAK

Infrastruktur desa merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Perencanaan infrastruktur yang tepat memerlukan identifikasi kebutuhan, pengamatan kondisi lapangan, serta keterlibatan masyarakat agar pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah. Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan infrastruktur di Desa Air Baus 1, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi observasi lapangan, identifikasi kondisi dan kebutuhan infrastruktur, diskusi dengan masyarakat dan perangkat desa, serta pendampingan dalam merumuskan rekomendasi perencanaan pembangunan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perencanaan infrastruktur yang terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kondisi lingkungan dan prioritas kebutuhan setempat. Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan di Desa Air Baus 1.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Penulis Korespondensi:

Zefri Yedi

Universitas Ratu Samban, bengkuluyedi027@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan. Infrastruktur seperti jalan lingkungan, saluran drainase, sarana sanitasi, dan fasilitas umum berperan dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan infrastruktur perlu dilakukan secara terarah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan, serta ketersediaan sumber daya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pengembangan potensi desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Perencanaan pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga perlu memperhatikan proses identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting karena masyarakat memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi lingkungan dan permasalahan infrastruktur yang dihadapi. Jannah dan Rodiyah (2021) membahas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa dan menunjukkan pentingnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan. Sementara itu, Damayanti dan Syarifuddin (2020) menekankan bahwa partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa perlu berlangsung secara inklusif agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara lebih baik.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan infrastruktur memerlukan pendekatan yang menggabungkan aspirasi masyarakat dengan pertimbangan teknis. Dari perspektif Teknik Sipil, identifikasi kondisi lapangan, pengukuran sederhana, dokumentasi, serta penentuan kebutuhan dan prioritas merupakan langkah awal yang dapat mendukung penyusunan rencana pembangunan. Pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan jenis infrastruktur yang menjadi perhatian. Selain itu, transparansi informasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dibutuhkan agar proses perencanaan dapat dilaksanakan secara terarah. Ainurrohman dan Mursyidah (2024) menyoroti pentingnya perencanaan strategis dan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi hambatan perencanaan pembangunan infrastruktur.

Dasar pelaksanaan pembangunan desa di Indonesia juga diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan tersebut menjadi salah satu rujukan dalam memahami kerangka perencanaan pembangunan desa. Dalam konteks pendampingan, proses perencanaan perlu memperhatikan tahapan yang berlaku, kebutuhan setempat, serta koordinasi dengan pemerintah desa agar masukan yang dihasilkan dapat dipertimbangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Desa Air Baus 1, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, menjadi lokasi kegiatan pendampingan masyarakat dalam perencanaan infrastruktur melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan ini merupakan bentuk penerapan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa Teknik Sipil dalam mendukung proses identifikasi kebutuhan infrastruktur di tingkat desa. Pendampingan diarahkan untuk membangun komunikasi

dengan masyarakat dan perangkat desa, mengamati kondisi infrastruktur yang menjadi perhatian, serta menghimpun masukan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Kondisi dan kebutuhan spesifik infrastruktur di Desa Air Baus 1 perlu dijelaskan berdasarkan hasil observasi lapangan dan dokumentasi kegiatan KKN.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi masyarakat Desa Air Baus 1 dalam mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan mendukung perencanaan pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif dengan menerapkan prinsip dasar Teknik Sipil. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan infrastruktur yang sistematis serta menghasilkan masukan awal bagi pemerintah desa dalam mempertimbangkan prioritas pembangunan. Dengan demikian, pendampingan ini diharapkan dapat mendukung proses perencanaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada pembangunan desa yang berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Air Baus 1, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan deskriptif-partisipatif melalui observasi lapangan, identifikasi kebutuhan infrastruktur, koordinasi dengan pemerintah desa, diskusi bersama masyarakat, serta penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi infrastruktur desa dan mengidentifikasi kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi lapangan serta aspirasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada pendekatan pendampingan teknis berbasis pemberdayaan masyarakat yang dibahas oleh Munizar et al. (2025) dalam kegiatan identifikasi permasalahan desa untuk meningkatkan akses air bersih di Desa Samban Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai kondisi wilayah serta kebutuhan infrastruktur. Selanjutnya, observasi lapangan dilakukan dengan mengamati kondisi fisik lingkungan dan infrastruktur yang menjadi fokus kegiatan. Pengamatan dapat mencakup jalan lingkungan, saluran drainase, fasilitas umum, serta sarana pendukung lainnya sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Hasil observasi dicatat dan didokumentasikan sebagai bahan identifikasi kondisi eksisting dan permasalahan infrastruktur yang memerlukan perhatian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mempertimbangkan kondisi fisik, fungsi infrastruktur, manfaat bagi masyarakat, serta tingkat urgensi penanganannya.

Tahap berikutnya adalah pendampingan masyarakat melalui komunikasi dan diskusi bersama warga serta perangkat desa untuk memperoleh informasi tambahan mengenai kebutuhan dan permasalahan infrastruktur. Aspirasi masyarakat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan agar perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan setempat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang berperan aktif dalam mengidentifikasi permasalahan dan memberikan masukan terhadap pembangunan desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Munizar et al. (2025), identifikasi permasalahan lapangan

merupakan bagian penting dalam pendampingan teknis untuk membantu merumuskan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Hasil observasi dan diskusi selanjutnya digunakan untuk menyusun rekomendasi awal perencanaan infrastruktur yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Desa Air Baus 1 dalam menentukan prioritas pembangunan. Rekomendasi dapat berupa usulan perbaikan, pemeliharaan, atau kebutuhan kajian teknis lanjutan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan. Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif dengan meninjau pelaksanaan tahapan pendampingan, hasil identifikasi kebutuhan infrastruktur, masukan masyarakat, dan rekomendasi yang telah disusun. Seluruh proses kegiatan kemudian didokumentasikan dalam laporan KKN sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta sebagai bahan pendukung perencanaan pembangunan infrastruktur desa yang lebih terarah dan berkelanjutan.

HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan masyarakat dalam perencanaan infrastruktur dilaksanakan di Desa Air Baus 1, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan ini berfokus pada pengamatan kondisi lingkungan, identifikasi kebutuhan infrastruktur, serta pengumpulan informasi dari masyarakat dan perangkat desa sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembangunan, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna infrastruktur. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, yang mengatur penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan desa (Republik Indonesia, 2014, sebagaimana telah diubah).

Observasi lapangan merupakan tahap penting untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi infrastruktur desa. Pengamatan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan masyarakat dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan, perbaikan, maupun pengembangan infrastruktur. Dalam bidang Teknik Sipil, pengamatan kondisi eksisting menjadi langkah awal untuk menentukan kebutuhan penanganan berdasarkan fungsi infrastruktur dan kondisi lapangan. Informasi hasil observasi perlu didukung dokumentasi serta komunikasi dengan masyarakat agar identifikasi permasalahan mempertimbangkan kondisi fisik dan pengalaman masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Hasil identifikasi tersebut dapat menjadi masukan awal bagi pemerintah desa dalam menentukan kebutuhan kajian teknis dan prioritas pembangunan.

Keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam proses perencanaan infrastruktur karena masyarakat memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi lingkungan dan kebutuhan pembangunan. Jannah dan Rodiyah (2021), dalam penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa, mengkaji keterlibatan masyarakat melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kajian tersebut relevan dengan pendampingan di Desa Air Baus 1 karena menunjukkan pentingnya memperhatikan keterlibatan warga dalam proses perencanaan. Melalui komunikasi dan diskusi bersama masyarakat serta perangkat desa, informasi mengenai kebutuhan infrastruktur dapat dihimpun sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi pembangunan.

Widodo (2018) juga mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan. Kajian tersebut menegaskan relevansi evaluasi partisipasi masyarakat dalam memahami pelaksanaan program infrastruktur. Dalam konteks kegiatan KKN di Desa Air Baus 1, partisipasi masyarakat dapat menjadi aspek yang diperhatikan untuk menilai apakah proses identifikasi kebutuhan telah memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi. Namun, tingkat partisipasi dan dampak kegiatan di Desa Air Baus 1 perlu ditentukan berdasarkan dokumentasi dan hasil kegiatan yang benar-benar diperoleh, bukan semata-mata berdasarkan penelitian di lokasi lain.

Hasil identifikasi kebutuhan infrastruktur dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi awal pembangunan. Penyusunan rekomendasi perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi fisik infrastruktur, manfaat yang diharapkan, serta ketersediaan sumber daya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dapat dijadikan salah satu rujukan dalam memahami kerangka pelaksanaan pembangunan desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Untuk infrastruktur yang memerlukan penanganan lebih lanjut, kajian teknis dapat mencakup survei dan pengukuran lapangan, penyusunan gambar rencana, perhitungan volume pekerjaan, serta estimasi biaya sesuai dengan jenis pekerjaan dan kompetensi pelaksana.

Secara keseluruhan, pendampingan masyarakat dalam perencanaan infrastruktur di Desa Air Baus 1 merupakan bentuk penerapan ilmu Teknik Sipil dalam mendukung proses pembangunan desa. Kegiatan ini berpotensi membantu masyarakat dan pemerintah desa memahami pentingnya identifikasi kebutuhan, observasi lapangan, dan partisipasi dalam perencanaan. Untuk menunjukkan hasil secara terukur, pembahasan perlu dilengkapi data konkret, seperti jenis infrastruktur yang diamati, jumlah lokasi survei, permasalahan yang ditemukan, masukan masyarakat, serta rekomendasi yang dihasilkan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kontribusi kegiatan KKN terhadap proses perencanaan infrastruktur desa.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan masyarakat dalam perencanaan infrastruktur di Desa Air Baus 1, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu Teknik Sipil melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan ini berfokus pada pentingnya observasi lapangan, identifikasi kebutuhan infrastruktur, serta keterlibatan masyarakat dan perangkat desa dalam mendukung proses perencanaan pembangunan. Pendekatan partisipatif dapat membantu menghimpun informasi mengenai kebutuhan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur desa. Selain memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan infrastruktur yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan wilayah. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak yang memiliki kompetensi teknis perlu terus ditingkatkan untuk mendukung perencanaan infrastruktur yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrohman, M. A., & Mursyidah, L. (2024). Overcoming barriers in infrastructure development planning and community involvement. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1098>
- Damayanti, R. A., & Syarifuddin. (2020). The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*, 30(5), 624–634. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151>
- Jannah, A., & Rodiyah, I. (2021). Community participation in village infrastructure development planning. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 10. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v10i0.764>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111737/permendagri-no114-tahun-2014>
- Munizar, R., Anggraini, W. P., Latif, M., & Mantap, B. (2025). Pendampingan teknis identifikasi permasalahan desa dalam peningkatan akses air bersih berbasis pemberdayaan masyarakat di Dusun III Air Solok Desa Samban Jaya Kecamatan Batik Nau Bengkulu Utara. *PAKDEMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(3), 569–574. <https://doi.org/10.58222/pakdemas.v4i3.505>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Widodo, F. (2018). Evaluasi partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur dalam konteks pemberdayaan masyarakat. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(2), 108–121. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i2.15932>